



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB II

KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai pendukung untuk melakukan penelitian. Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini.

Tabel 2.1 Matriks Penelitian Terdahulu

	Penelitian 1	Penelitian 2	Penelitian 3
Nama Peneliti (Tahun)	Rakhmania Anindhita Pithaloka (2001)	Yulius Triatmoko (2014)	Wisnu Martha Adiputra (2006)
Judul	Objektivitas Pemberitaan Surat Kabar (Analisis Isi Pemberitaan Calon Ketua Umum Partai Golkar Menjelang Musyawarah Nasional Golkar 2009 di Koran Kompas dan Media Indonesia)	Keberimbangan Berita Pelanggaran Pemilu Legislatif 2014 di Harian Kompas (Analisis Isi Kuantitatif)	Melampaui Jurnalisme: Dimensi Evaluatif Berita Surat Kabar Indonesia (Kompas dan Bernas) dan Agenda Jurnalisme Publik
Rumusan Masalah	Adakah Pelanggaran Objektivitas dalam Pemberitaan Pemilihan Ketua Umum Golkar 2009 di Harian Kompas dan Media Indonesia?	Bagaimana keberimbangan pemberitaan tentang Pelanggaran Pemilu Legislatif 2014 di Harian Kompas?	Bagaimana media massa mampu mewujudkan demokrasi?
Konsep /	➢ Objektivitas	➢ Teori Tanggung	

Teori	<p>Pemberitaan</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Definisi Konseptual 	<p>Jawab Sosial</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Komunikasi Massa ➤ Surat Kabar ➤ Keberimbangan Berita ➤ Pemilihan Umum ➤ Pelanggaran Pemilu 	
Metode	Analisis Isi Kuantitatif	Analisis Isi Kuantitatif	Analisis Isi Kuantitatif
Kesimpulan	<ul style="list-style-type: none"> - Objektivitas telah dilanggar - Permasalahan yang paling kentara dalam sub dimensi <i>balance</i>. Ada calon yang di favoritkan dan ada yang tidak bahkan di pojokkan dalam pemberitaan - Dari dimensi faktualitas, permasalahan paling penting terdapat dalam akurasi, terutama pencantuman atribusi menjadi penting. 	<p>Adanya 31 berita pelanggaran pemilu selama periode 1 Januari – 12 April 2014. Keberimbangan berita dari kategori <i>source bias</i> menunjukkan bahwa hanya 32% berita yang menampilkan dua sisi, sedangkan 68% menampilkan satu sisi narasumber. Keberimbangan dari kategori <i>slant</i> menunjukkan bahwa 84% berita tidak mengandung penilaian wartawan. Sedangkan keberimbangan dari representasi pro-kontra menunjukkan 90% dari berita memberikan porsi yang tidak sama.</p>	<p>a. Keseimbangan (Balance) dan Netralitas (Neutrality) Surat Kabar Kompas</p> <p>Pada surat kabar Kompas, berita yang diteliti berjumlah 117 berita. Sebesar 90 berita (50,8%) berasal dari surat kabar Kompas periode bulan Juli dan sisanya sebesar 87 berita (49,2%) berasal dari periode Agustus. Keseimbangan pada berita Kompas, diukur berdasarkan tiga elemen, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Source Bias</i>, sebanyak 5,1% atau 9 berita yang diteliti memiliki kecenderungan <i>source bias</i>, 2. <i>Slant</i>, sebanyak 0,6% atau 1 berita Kompas

		<p>Oleh karena itu, dari 31 berita tersebut, paling banyak (58,07%) termasuk dalam kategori cukup berimbang.</p>	<p>yang diteliti memiliki kandungan <i>slant</i>.</p> <p>3. Bentuk ketidakseimbangan pemberitaan (Representasi Pro-Kontra), sebesar 5,1% atau 9 berita memiliki ketidakseimbangan pemberitaan. Dari 9 berita bentuk ketidakseimbangan berupa porsi alinea sebesar 22,2% (2 berita), representasi narasumber sebesar 55,6% (5 berita), representasi aktor sebesar 0% (0 berita), pemakaian kata atau kalimat hiperbola sebesar 0% (0 berita), kuantitas data atau fakta yang dibutuhkan sebesar 22,2% (2 berita) dan lainnya sebesar 0% (0 berita).</p> <p>Sedangkan, untuk aspek netralitas dapat diukur berdasarkan empat elemen, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sensasionalisme, dapat diukur melalui tiga elemen. Pertama ada tidaknya personalisasi, dalam surat kabar Kompas tingkat
--	--	--	--

			<p>personalisasi sangat rendah, yakni sekitar 1,7% (3 berita).</p> <p>Kedua, aspek emosionalisme sebesar 0,6% (1 berita), dan dramatisasi lebih besar jika dibandingkan dengan aspek personalisasi dan emosionalisme sebesar 0,6% (1 berita).</p> <p>2. <i>Stereotype</i>, dalam surat kabar Kompas, unsur <i>stereotype</i> sebesar 1,1% (2 berita),</p> <p>3. <i>Juxtaposition</i>, sebesar 0,6% (1 berita)</p> <p>4. <i>Linkages</i>, Kompas mengandung unsur <i>linkages</i> sangat rendah sebesar 2,3% (4 berita).</p> <p>Dari seluruh aspek yang tersebut, dapat dilihat bahwa Kompas memiliki Kinerja yang sangat baik berkaitan dengan dimensi evaluatif.</p>
			<p>b. Keseimbangan (Balance) dan Netralitas (Neutrality) Surat Kabar Bernas</p> <p>Pada surat kabar <i>Bernas</i> berita yang diteliti berjumlah 238. Sejumlah</p>

		<p>120 berita (50,8%) berasal dari periode bulan Juli, sedangkan sisanya 118 berita (49,2%) berasal dari periode bulan Agustus. Keseimbangan pada berita Kompas, diukur berdasarkan tiga elemen, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Source Bias</i>, sebanyak 19,6% atau 46 berita yang diteliti memiliki kecenderungan <i>source bias</i>, 2. <i>Slant</i>, sebanyak 2,6% atau 6 berita Bernas yang diteliti memiliki kandungan <i>slant</i> dalam pemberitaannya, 3. Bentuk ketidakseimbangan pemberitaan (Representasi Pro-Kontra), sebesar 23,3% atau 55 berita memiliki ketidakseimbangan pemberitaan. Dari 55 berita bentuk ketidakseimbangan berupa porsi alinea sebesar 14,3% (8 berita), representasi narasumber sebesar 63,2% (36 berita), representasi aktor sebesar 7,1% (4
--	--	---

			<p>berita), pemakaian kata atau kalimat hiperbola sebesar 5,4% (3 berita), kuantitas data atau fakta yang dibutuhkan sebesar 28,6% (16 berita) dan lainnya sebesar 0% (0 berita).</p> <p>Sedangkan, untuk aspek netralitas dapat diukur berdasarkan empat elemen, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Sensasionalisme</i>, dapat diukur melalui tiga elemen. Pertama ada tidaknya personalisasi, dalam surat kabar Bernas tingkat personalisasi sangat rendah, yakni sekitar 4,2% (10 berita). Kedua, aspek emosionalisme sebesar 1,3% (3 berita), dan dramatisasi lebih besar jika dibandingkan dengan aspek personalisasi dan emosionalisme sebesar 5,1% (12 berita). 2. <i>Stereotype</i>, dalam surat kabar Bernas, unsur <i>stereotype</i> rendah sebesar 0,4% (1 berita), 3. <i>Juxtaposition</i>, tidak
--	--	--	---

			<p>ada berita yang bermuatan <i>juxtaposition</i> dalam pemberitaan Bernas</p> <p>4. <i>Linkages</i>, Bernas mengandung unsur <i>linkages</i> sangat rendah sebesar 0,8% (2 berita).</p> <p>Hasil dari riset tersebut, menunjukkan bahwa dimensi evaluatif penting untuk diperhatikan dalam pemberitaan. Secara luas, kepentingan politik lebih besar mempengaruhi isi berita dan format isi pesan juga mempengaruhi komunikasi politik secara menyeluruh.</p>
--	--	--	--

Dari penelitian terdahulu di atas, terlihat bahwa terdapat media (surat kabar) yang cukup berimbang dalam memberitakan suatu berita, tetapi ada pula yang melanggar objektivitas, terlihat pada dimensi *balance* terhadap calon yang difavoritkan dan dipojokkan. Setiap media massa, tentunya memiliki cirinya tersendiri dalam menyampaikan sebuah berita. Oleh karena itu, penulis ingin membuktikan apakah dalam pemberitaan mengenai rekening gendut Budi Gunawan di Koran *Tempo* memberitakannya dengan cara berimbang atau tidak adanya keberpihakan.

Ketiga penelitian tersebut, sama-sama meneliti dengan objek surat kabar harian. Penelitian ini juga meneliti dengan objek surat kabar harian, hanya saja pada Koran *Tempo*. Pada penelitian ini, penulis ingin meneliti isu terbaru mengenai Budi Gunawan tentang rekening gendut yang dimilikinya. Selain itu, penelitian ini juga menarik karena pada penelitian ini membahas mengenai orang nomor satu yang menentukan masalah hukum di Indonesia. Dengan meluasnya kasus tersebut, Budi Gunawan tetap bisa untuk menduduki jabatan sebagai orang nomor satu yang menentukan hukum di Indonesia.

2.2 Kerangka Konseptual

Terdapat beberapa teori dan konsep pemikiran mengenai komunikasi yang telah ditemukan. Oleh karena itu, untuk membahas mengenai ketidakberpihakan (*impartiality*) pemberitaan kasus rekening gendut Budi Gunawan di Koran *Tempo*, penulis memilih beberapa teori dan konsep pemikiran yang relevan dengan dengan penelitian yang dilakukan.

2.2.1 Teori Tanggung Jawab Sosial

Terdapat empat teori pers dalam dunia massa, yaitu Teori Pers Otoriter, Teori Libertarian, Teori Tanggung Jawab Sosial, dan Teori Soviet Totalitarian. Keempat teori tersebut berhubungan erat dengan perkembangan masyarakat pada tempat tertentu (Ardianto, 2005:149).

Menurut Ignatius Haryanto dalam bukunya yang berjudul *Indonesia Raya Dibredel!* (2006:236), Teori Tanggung Jawab Sosial

merupakan pengembangan dari teori pers libertarian, dan teori ini muncul dari keprihatinan yang dibawah oleh Komisi Kebebasan Pers. Teori ini lahir karena revolusi teknologi dan industri yang mengubah wajah dan cara hidup bangsa Amerika dan juga memengaruhi pers. Sedangkan, menurut Masduki dalam buku yang berjudul Regulasi Penyiaran Dari Otoriter ke Liberal (2007:66), Teori tanggung jawab sosial merupakan pengembangan sekaligus kritik terhadap teori liberal. Pers harus dilepas dari intervensi pemerintah, sensibilitas terhadap dampak buruk pers liberal. Dalam teori tanggung jawab sosial, dikenal adanya badan independen yang akan memantau dan menilai fungsi pers

Dalam teori tanggung jawab sosial ini, media tidak bisa bebas untuk mengemukakan pendapat dan mencari kebenaran, tetapi harus memiliki tanggung jawab sosial. Informasi yang disampaikan melalui media massa selalu memiliki efek atau dampak terhadap khalayak. Hal ini juga merupakan kritik-kritik yang terlontar ketika media massa telah tumbuh semakin besar dan penting perannya, dan mengandung ancaman terhadap peraturan pemerintah (Haryanto, 2006:236).

Oleh karena itu, dasar pemikiran dari teori ialah kebebasan pers harus disertai tanggung jawab kepada masyarakat dan kebebasan itu sendiri harus dibatasi oleh moral dan etika. Media massa melakukan tugasnya sesuai dengan standar hukum tertentu.

Dalam teori ini, menurut Ardianto (2007:162) prinsip kebebasan pers masih dipertahankan, tetapi harus disertai kewajiban untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dalam melaksanakan tugas pokoknya, seperti menyajikan berita harus bersifat objektif atau tidak menyajikan berita yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat. Hal yang perlu diperhatikan dalam teori ini adalah media harus memenuhi kewajiban sosial. Jika tidak, masyarakat akan membuat media tersebut mematuhi.

2.2.2 Media Massa

Melalui media massa penyebaran informasi dari satu orang ke orang lain dapat disampaikan secara cepat. Meskipun terdapat penyebaran media massa yang sangat cepat dalam kehidupan kita, banyak di antara kita yang tidak puas atau bersikap kritis terhadap kinerja industri media (Baran, 2012:22).

Media massa, seperti halnya pesan lisan dan isyarat. Pada hakikatnya, media adalah perpanjangan lidah dan tangan yang berjasa meningkatkan kapasitas manusia untuk mengembangkan struktur sosialnya (Rivers, *et.al*, 2008:27). Sedangkan menurut McLuhan, media adalah pesan itu sendiri, maksudnya adalah apa yang disampaikan media kepada masyarakat ternyata lebih dari apa yang akan diterima masyarakat jika berkomunikasi tanpa media (Rivers, *et.al*, 2008:37).

Menurut Tamburaka dalam bukunya yang berjudul *Agenda Setting Media Massa* (2012:13), media massa merupakan salah satu

unsur yaitu medium (media) tempat dimana proses komunikasi berlangsung. Sehingga, sebelum informasi tersebut di terima oleh masyarakat, harus melalui proses komunikasi massa. Komunikasi massa adalah proses komunikasi yang dilakukan melalui media massa dengan berbagai tujuan komunikasi dan untuk menyampaikan informasi kepada khalayak luas (Bungin, 2008:71). Komunikasi massa mengalami perubahan yang sangat pesat dan apa yang dianggap sebagai kemajuan hari ini dapat dianggap kuno keesokan harinya (West & Turner, 2008:41).

Sebagai sistem komunikasi, media massa menjalankan empat fungsi. Harold Lasswell telah mendefinisikan tiga di antaranya: penjagaan lingkungan yang mendukung; pengaitan berbagai komponen masyarakat agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan; serta pengalihan warisan sosial, sedangkan menurut Charles Wright dari Universitas Pennsylvania pentingnya fungsi keempat, yaitu sebagai sumber hiburan (Rivers, *et.al*, 2008:33-34).

Fungsi media massa bukan hanya sebagai saluran menyampaikan informasi, mendidik, menghibur, kontrol sosial, dan mempengaruhi masyarakat semata (Harahap, 2013:10). Kekuatan utama media terletak pada kontrol sosial. Joseph Kalpper melihat adanya kekuatan terpenting media, yang bisa dimanfaatkan untuk tujuan apa pun. Tujuan yang dimaksud yaitu untuk mengontrol dan mengendalikan masyarakat (Rivers, *et.al*, 2008:39).

Seperti yang telah dijelaskan di atas, fungsi media massa (menyampaikan informasi, mendidik, menghibur, serta persuasif), fungsi yang menonjol pada surat kabar adalah menyampaikan informasi (Ardianto, 2005:104). Hal tersebut sesuai dengan tujuan khalayak membaca surat kabar, yaitu ingin mengetahui setiap peristiwa yang terjadi setiap harinya. Dalam surat kabar, terdapat rubrik yang menyajikan berbagai jenis berita.

Surat kabar juga memiliki karakteristik (Ardianto, 2005:104-106), yaitu:

1. Publisitas

Publisitas atau *publicity* adalah penyebaran informasi (berita) pada publik ataupun khalayak.

2. Periodesitas

Periodesitas merujuk pada keteraturan terbitnya, bisa harian, mingguan, atau dwi mingguan.

3. Universalitas

Karakteristik ini merujuk pada kesemestaan isinya, yang beraneka ragam dari seluruh dunia. Oleh karena itu, isi surat kabar meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, seperti masalah sosial, ekonomi, budaya, agama, pendidikan, dan lain-lain.

4. Aktualitas

Aktualitas berarti “kini” dan “keadaan sebenarnya”. Kedua istilah tersebut erat kaitannya dengan berita, karena definisi berita itu sendiri adalah laporan tercepat mengenai fakta atau opini yang penting atau menarik minat ataupun keduanya.

5. Terdokumentasikan

Dari berbagai fakta yang disajikan di surat kabar dalam bentuk berita atau artikel, tentunya dapat dipastikan ada beberapa diantaranya yang dianggap penting oleh pihak tertentu yang kemudian diarsipkan atau dibuat kliping.

Menurut Deddy Mulyana dalam buku *Komunikasi Massa* (2008:100), pers saat ini belum mengalami kemajuan yang berarti, atau malah disebut kemunduran, dibandingkan dengan peran sebelumnya. Pada masa sekarang, pers berada di bawah ketiak pemerintah. Nyatanya, banyak media baik cetak maupun elektronik yang dimanfaatkan oleh pemiliknya untuk kepentingan pribadi, dengan tujuan untuk menarik perhatian khalayak. Dari banyaknya orang yang berada dibalik media, membuat media semakin melupakan tujuan dari media itu sendiri, yang masih terwujud hingga sekarang yaitu hiburan untuk khalayak.

Dengan demikian, fungsi media massa dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuannya. Fungsi kontrol sosial pada media massa ini berguna untuk mengontrol masyarakat dan pemerintah. Hal ini dapat

berguna untuk melihat tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

2.2.3 *Impartiality*

Dalam model Westertahl, aspek evaluatif berkaitan dengan ketidakberpihakan (*impartiality*). Sedangkan McQuail, membedakan aspek evaluatif ini menjadi dua, yakni *balance* dan netralitas. Pengertian *balance* dan netralitas tidak mudah dibedakan karena garis pembeda di antara keduanya tidak begitu jelas. Menurut McQuail (1992:223) yang dikutip Adipura dalam Rahayu (2006:74), *balance* berkaitan erat dengan proses seleksi dan substansi sebuah berita.

Netralitas sedikit berbeda dengan keseimbangan. Jika keseimbangan dapat dilihat dengan jelas pada berita, maka aspek netralitas dapat dipahami secara keseluruhan telah dimengerti dan seringkali tidak eksplisit. Netralitas juga tidak melebih-lebihkan fakta dan menempatkan pada posisi yang seimbang. Netralitas ada dalam berita tanpa kehadiran sensasionalisme, dramatisasi, dan emosionalisme.

a) *Balance* (Keseimbangan)

Menurut Rahayu (2006:22-23) berdasarkan konsep McQuail (1992), telah membuat operasionalisasi pengukuran keseimbangan. Terdapat tiga indikator yang dapat dipergunakan untuk mengukur keseimbangan berita. Pertama adalah *source*

bias. Aspek ini dapat dilihat dari ketidak-seimbangan sumber berita yang dikutip dalam peliputan. Sumber berita yang dikutip memiliki tingkat atau derajat yang sama. Hilangnya satu sumber dalam berita akan membuat keseimbangan berita berkurang.

Kedua adalah *Slant* yang merupakan kecenderungan media (wartawan atau editor) yang memberikan kritikan atau pujian secara spesifik dalam pemberitaan. Kritik atau pujian ini dapat dilihat sebagai bentuk kecenderungan media terhadap nilai-nilai tertentu. Ada atau tidaknya penilaian item positif dan negatif yang ditemukan dalam sebuah berita dapat dibandingkan untuk menilai apakah berita tersebut ditampilkan secara seimbang atau tidak. Sebuah berita dapat dikatakan seimbang, jika tidak ada pujian atau kritikan yang berasal dari media itu sendiri.

Ketiga adalah representasi pro-kontra. Untuk melihat representasi pro-kontra ini dapat dilihat melalui adanya kesamaan kesempatan atau ruang yang diberikan yang bisa diukur melalui jumlah alinea yang memberitakan pihak yang pro maupun pihak yang kontra. Ketidakseimbangan pemberitaan terjadi ketika berita-berita yang mengandung muatan pro maupun kontra.

Menurut McQuail (2011:97), untuk mengukur sebuah berita terdapat ketidakberpihakan (*impartiality*) atau tidak

membutuhkan keseimbangan dalam pilihan dan penggunaan sumber yang mencerminkan sudut pandang berbeda dan juga penyajian dari dua (atau lebih) sisi di mana penilaian atau fakta diperbandingkan. Masing-masing pihak tentunya memiliki pendapat atau pun argumentasinya yang dianggap benar. Di sini, tugas seorang wartawan bukan untuk mencari siapa yang benar atau salah, melainkan menyajikan perbedaan pendapat yang ada secara apa adanya.

Dalam mengukur keseimbangan cukup sederhana tetapi, pada praktiknya dapat menjadi rumit. keseimbangan biasanya di nilai karena banyak peristiwa yang melibatkan konflik dan terbuka bagi penafsiran dan evaluasi alternatif (terutama pada berita politik).

b) *Neutrality* (Netralitas)

Sub dimensi dari imparsialitas yang kedua adalah netralitas. Sub dimensi netralitas (*neutrality*) sering disamakan dengan ketidakberpihakan (*impartiality*) dalam pemberitaan. Berita yang menyampaikan peristiwa dan fakta apa adanya, tidak memihak pada sisi dari peristiwa (Eriyanto, 2013:195).

Netralitas (*neutrality*) sering disamakan dengan ketidakberpihakan (*impartiality*) dalam pemberitaan. Aspek netralitas (*neutrality*) sendiri berbeda dengan keseimbangan.

Jika keseimbangan dapat dilihat dengan jelas pada berita, maka netralitas dapat dipahami bila keseluruhan berita telah dimengerti, dan seringkali netralitas tidak eksplisit.

Menurut Adipura (2006:75) Netralitas lebih berkaitan dengan aspek presentasi yang terlihat dalam suatu berita (McQuail, 1992:233). Netralitas (*neutrality*) ada di dalam berita tanpa adanya kehadiran sensasionalisme, dramatisasi, dan emosionalisme. Oleh karena itu, netralitas dapat diamati melalui empat hal, yakni sensasionalisme, *stereotype*, *juxtaposition*, dan *linkages*.

Aspek pertama adalah sensasionalisme. Sensasionalisme dapat diartikan sebagai sifat yang suka menimbulkan sensasi, dengan tujuan untuk menarik perhatian orang lain. Sensasionalisme dapat diukur berdasar tiga elemen, yaitu ada tidaknya personalisasi, ada tidaknya emosionalisme, dan ada tidaknya dramatisasi.

Aspek kedua adalah *stereotype*, yang berarti pemberian atribut tertentu terhadap individu, kelompok, atau bangsa tertentu dalam penyajian berita. Aspek ini dapat menjadikan individu memiliki asosiasi yang positif, tetapi tidak pernah netral pada kenyataan yang sebenarnya. *Stereotype* biasanya terjadi pada pemberitaan, bukan berarti diperbolehkan, tetapi

stereotype dapat terjadi bila jurnalis mengabaikan kondisi sosiokultural masyarakat.

Aspek ketiga adalah *juxtaposition*. *Juxtaposition* diartikan sebagai menyangding dua hal yang berbeda. Aspek ini digunakan oleh wartawan untuk menyangdingkan dua fakta yang berbeda untuk menimbulkan efek kontras yang akhirnya menambah kesan dramatis pada berita. Informasi yang tidak memadai, penarikan kesimpulan yang terburu-buru, dan keinginan yang sangat kuat untuk mendapatkan efek tertentu, tiga hal tersebut yang membuat munculnya *juxtaposition*.

Linkages, merupakan aspek terakhir. *Linkages* mirip dengan *juxtaposition*, yaitu penarikan kesimpulan yang salah antara dua fakta atau lebih. Sedangkan perbedaannya, *linkages* kelihatan lebih relevan untuk menghubungkan dua fakta yang berkaitan. *Linkages* sendiri memiliki arti yaitu menyangdingkan dua fakta yang berlainan dengan maksud untuk menimbulkan efek asosiatif, sehingga kedua fakta tersebut memiliki sebab akibat.

2.3 Kerangka Pemikiran

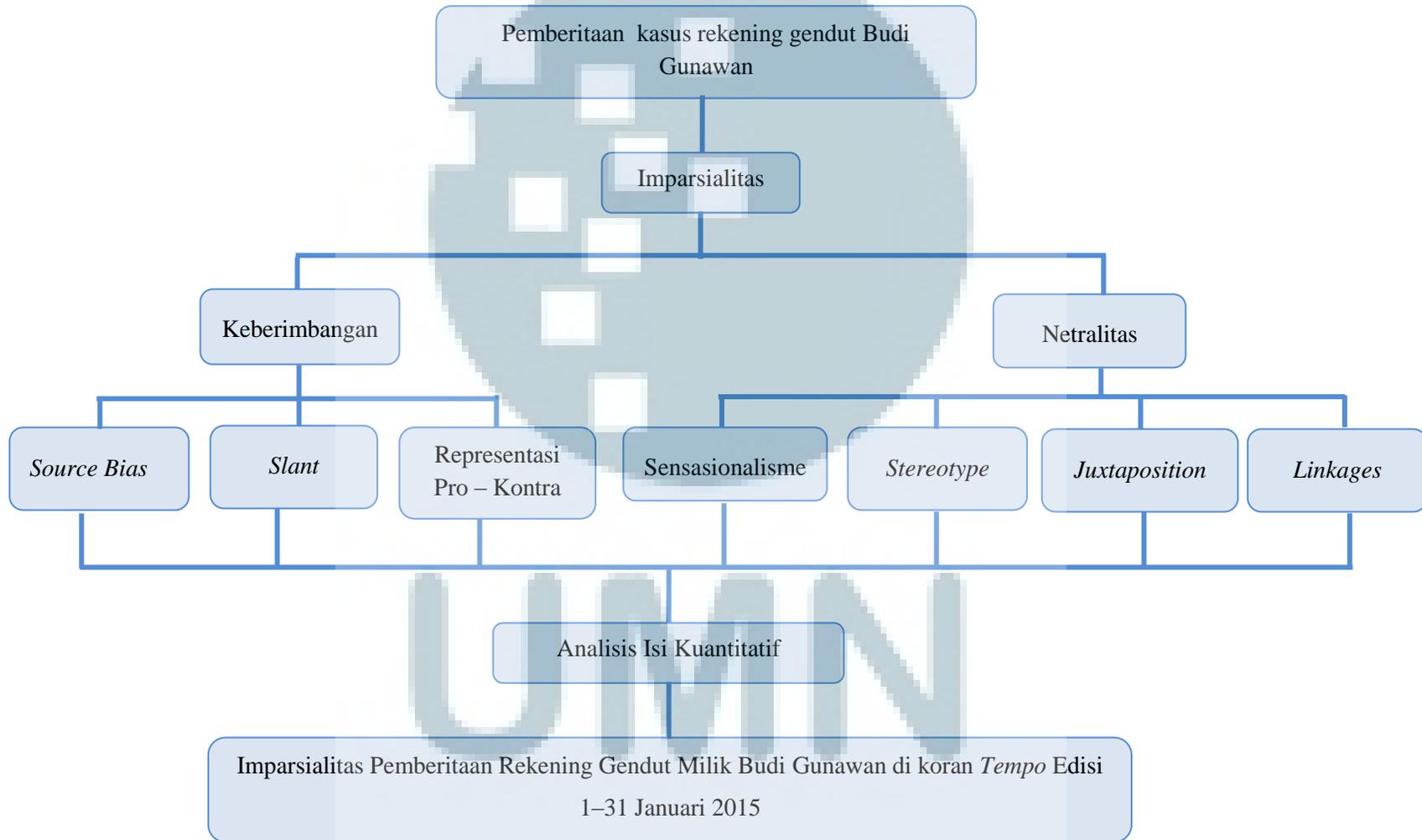
Dalam memberitakan suatu kejadian, media massa dituntut untuk selalu bersikap seimbang dengan memberikan informasi yang sesuai dengan realitasnya.

ketidakberpihakan (*impartiality*) seringkali dijadikan ukuran kualitas sebuah berita, yang dijadikan sebagai acuan penilaian (evaluasi) berita (Rahayu, 2006:10). Hal tersebut juga harus dilakukan dalam pemberitaan mengenai rekening gendut Budi Gunawan. Dalam memberitakan mengenai rekening gendut, seharusnya Koran *Tempo* memperhatikan unsur keseimbangan karena dalam sebuah kasus rekening gendut ini terdapat pro dan kontra mengenai kasus tersebut.

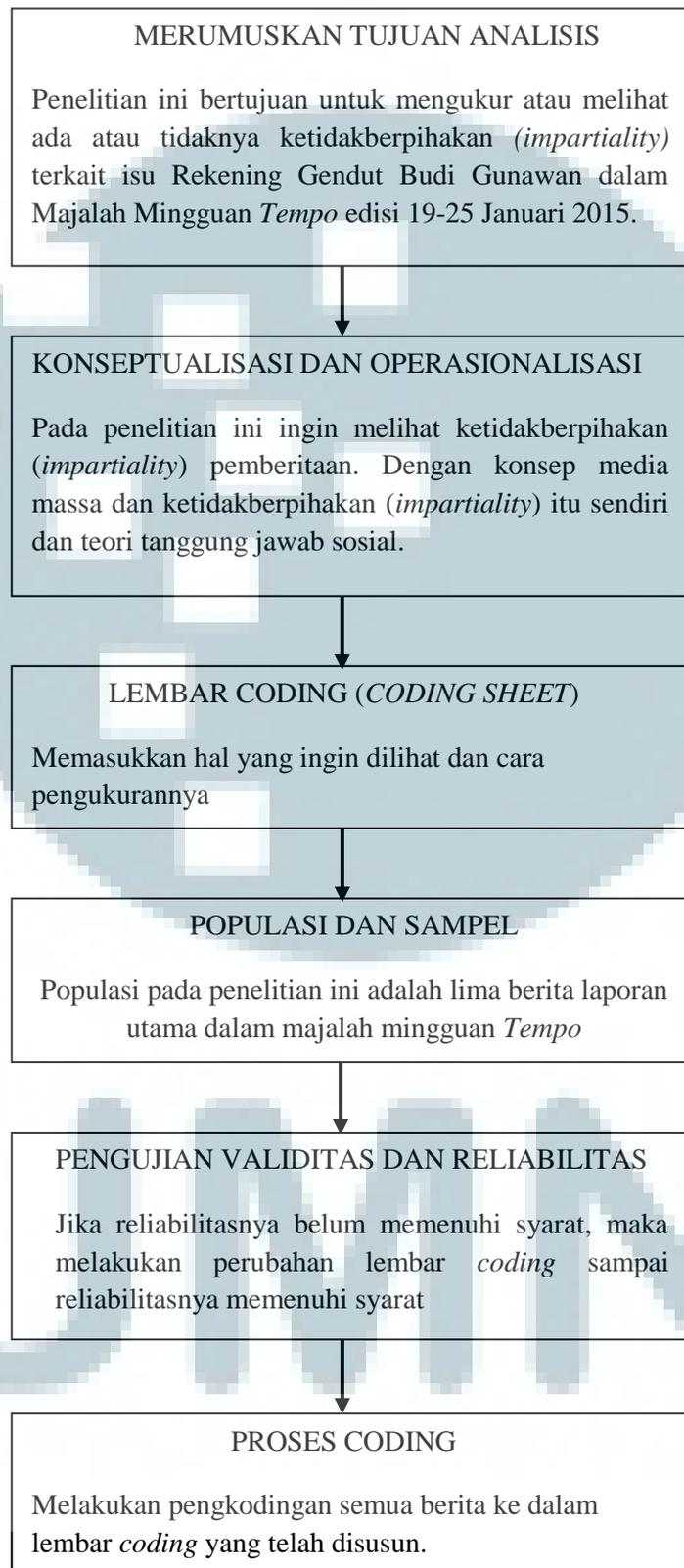
Maka dari itu, keseimbangan dalam pemberitaan rekening gendut Budi Gunawan di Koran *Tempo* dapat dianalisis menggunakan metode analisis isi kuantitatif. Dengan teknik ini, penelitian akan berjalan dengan sistematis sehingga hasil penelitian akan menjadi akurat dan tepat.

UMMN

Gambar 2.2 Bagan Kerangka Pemikiran



Gambar 2.3 Tahapan Analisis Isi



↓

PERHITUNGAN RELIABILITAS FINAL
Peneliti menghitung angka reliabilitas dari hasil *coding* formula Holsti.

↓

INPUT DATA DAN ANALISIS
Peneliti melakukan input data dari lembar coding dan analisis data

UMMN